

**PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)
(Studi Kasus Pada PD. Pasar Larangan-Sidoarjo)**

Andrianto

Email: Andrianto914@yahoo.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

This study describes the accounting records at the Sector Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in PD. Prohibition -Sidoarjo market in the implementation of the Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK -ETAP) issued in 2009. From the results of Research has shown that most of the traders SME sector in PD. Prohibition -Sidoarjo market still perform minimally accounting records and accounting reporting only be done only on the management of businesses that do not run themselves. Besides, it is also due to limited educational background of the SMEs in PD. Surya market Larangan- Sidoarjo.

Pendahuluan

Sektor Usaha yang tergabung dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah terbukti memberikan dampak perekonomian yang bagus bagi Bangsa. Hal ini terbukti adanya peningkatan PDB dari tahun ke tahun. Menurut data kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2013 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia pada triwulan ke III- 2012 tumbuh sebesar Rp. 135.602,20 Juta atau meningkat sebesar 9.90% dari tahun 2011. Besarnya kontribusi dari sumbangan PDB UMKM, akan berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja dari sektor UMKM yaitu hingga tahun 2013 telah tumbuh sebesar 114.144.0082 juta atau 6,03% dari tahun 2012. (www.depkop.go.id)

Seiring dengan peningkatan pada tenaga kerja sektor UMKM juga berdampak pada unit UMKM yang telah tersebar di Seluruh Indonesia. Hingga tahun 2013, jumlah unit UMKM yang telah tersebar adalah sebanyak 57.895.721 juta unit usaha. (www.depkop.go.id). Besarnya UMKM menggambarkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat berkontribusi lagi bagi negeri ini. Hal ini terbukti sejak krisis moneter dari tahun 1997 hingga tahun 2012, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan dari krisis.

Disaat banyak perusahaan besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, sektor UMKM mampu

menyerap pengangguran untuk dapat bekerja kembali.

Dibanyak negara, sektor UMKM juga menyumbang kontribusi yang banyak bagi pembangunan bangsa. Tercatat jumlah UKM dinegara maju rata-rata mencapai 90% dari seluruh total unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari seluruh jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten 2006). Hal ini disebabkan karena dampak kegagalan usaha yang dijalankan oleh sector UMKM tidak terlalu berdampak signifikan pada perekonomian nasional suatu negara.

Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar tersebut terhadap sektor UMKM tersebut sering terkendala dengan permodalan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih kompetitif sehingga produk yang dihasilkan pun juga harus diperkuat (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013). Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program yang telah dijalankan oleh Pemerintah guna memperkuat permodalan di sektor UMKM salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi sektor UMKM. Sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri & Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya, realisasi KUR jauh dari target karena bank yang ditunjuk untuk menjadi penyalur KUR terlalu berhati-hati

dalam penyaluran kredit disamping itu juga bank tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi sektor UMKM. Rata-rata mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi yang terkait dengan kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten,2006).

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan kredit seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono,2009) . Namun dalam pelaksanaannya pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi pengusaha UMKM karena keterbatasan pengetahuan terhadap ilmu akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi pengusaha UMKM. Dari berbagai anggapan dan keterbatasan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah lebih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang tidak memiliki dasar ilmu akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pencatatan akuntansi terkait kondisi usaha yang dijalankan.Sedangkan menurut Satyo (2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM.Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).SAK ETAP ini telah berlaku efektif per 1 Januari 2011, namun penerapan sebelum tanggal tersebut masih efektif diperbolehkan. Dalam SAK ETAP, Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas yang : (1) tidak memiliki akuntabilitas public yang signifiikan, (2)Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sesulit seperti SAK umum .Selain adanya SAK ETAP ini juga memberikan kemudahan lain bagi pelaku usaha UMKM, yaitu dalam hal pembukuan akuntansi seiring dengan semakin banyaknya *software* akuntansi yang

dapat digunakan oleh pelaku UMKM. Dari pernyataan diatas, kedepannya diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan pembukuan akuntansi yang berlandaskan pada SAK ETAP ini. Sehingga kesulitan pembiayaan untuk mendapatkan permodalan dari bank yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pengajuan pinjaman dapat terpenuhi.

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka standar ini di maksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, nampak masih banyak pelaku usaha UMKM yang kurang memahami terhadap proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi para pengelola UMKM terhadap proses pencatatan akuntansi atau pembukuan dengan berlandaskan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Dapat memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi pelaku Usaha UMKM yang berada di PD. Pasar Larangan- Sidoarjo mengenai proses pencatatan akuntansi dan laporan keuangan. (2) Memberikan pemahaman akan penerapan Standar Akuntansi Untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UMKM di PD. Pasar Larangan-Sidoarjo.(3)Bahan kajian untuk menyusun dan mengembangkan panduan proses pencatatan akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM agar mudah diimplementasikan.

TELAAH PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Kieso (2007) akuntansi dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pihak yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, 2006).

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fees (2006) Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari 5 (lima) yaitu: neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang berguna untuk memberikan informasi mengenai posisi bisnis suatu usaha.

Laporan Laba Rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu, misal sebulan atau setahun. Laporan ini melaporkan tentang pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau *matching concept* yaitu dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Laporan ini juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang disebut dengan keuntungan bersih atau juga sebaliknya, jika beban lebih besar dari pada pendapatan disebut rugi bersih. (Warren, 2006).

Laporan Perubahan modal suatu ikhtisar mengenai perubahan pada modal pemilik yang telah terjadi selama periode waktu tertentu seperti pada bulanan maupun tahunan. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laporan laba rugi ikut muncul pada laporan ini. (Warren, 2006).

Neraca merupakan sebuah laporan yang berisi daftar mengenai aset, kewajiban, dan modal pemilik pada tanggal tertentu. Pada umumnya tanggal pada neraca menggunakan hari pada akhir bulan atau akhir tahun. (Warren, 2006).

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Laporan Arus Kas dapat

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam Aset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Usaha Mikro Dan Kecil Menengah

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro : Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- Aset \leq Rp50.000.000,00, Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Omzet \leq Rp300.000.000,00, Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- $Rp50.000.000,00 < Aset \leq Rp500.000.000,00$, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau $Rp300.000.000,00 < Omzet \leq 2.500.000.000,00$, Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Rp500.000.000,00 < Aset ≤ Rp10.000.000.000,00, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Rp2.500.000.000,00 < Omzet ≤ Rp50.000.000.000,00, Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan Salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas public, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan SAK ETAP. SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan (IAI, 2009).

SAK ETAP bertujuan untuk dapat mengakomodir kebutuhan dari entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Selain itu juga untuk membantu membuat standar akuntansi yang dapat digunakan oleh UMKM karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan SAK Umum. Hal terpenting dari implementasi SAK ETAP adalah pemahaman yang baik atas SAK ETAP tersebut oleh UMKM tersebut.

Penelitian Terdahulu

Murniati (2002) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan

akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan.

Penelitian Pinasti (2001) menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar. Secara umum mereka menganggap informasi akuntansi tidak penting. Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain: mereka merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut dan yang penting mereka mendapatkan laba tanpa dibebani dengan penyelenggaraan akuntansi. Mereka belum merasakan manfaat dari penyelenggaraan pembukuan.

Baas dan Schrooten (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM menggunakan Soft Information & Hard Information. Soft Information menggunakan teknik Relationship Lending yakni penyaluran kredit atas dasar kepercayaan dan hubungan yang telah terbina baik antara bank dengan pengusaha. Hard information diantaranya menggunakan: 1) Financial statement Lending yakni dengan menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian kredit, 2) Assets Based Lending, yakni dengan menggunakan informasi terkait aset-aset yang dijadikan jaminan, 3) Credit Scoring, penggunaan teknik statistik dengan menggunakan data-data keuangan dari laporan keuangan dan juga creditworthiness dan latar belakang dari pemilik UMKM untuk diberikan peringkat. Baas dan Schrooten berkesimpulan bahwa hampir di seluruh dunia UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan. Salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan informasi yang mampu diberikan oleh UMKM kepada pihak eksternal. Saran yang diberikan dalam penelitian tersebut adalah pentingnya standar akuntansi yang mampu mengakomodir kebutuhan dari pengusaha UMKM, agar dapat

membantu UMKM dalam menyediakan informasi keuangan yang lebih berkualitas.

Cziráky et al. (2005) meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemberian kredit UMKM di Kroasia. Program kredit UMKM yang dijalankan pemerintah Kroasia ternyata penyaluran kreditnya rendah, padahal pemerintah telah memberikan subsidi terhadap tingkat suku bunganya serta pasokan dana yang dianggap mencukupi kebutuhan kredit bagi UMKM. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa rata-rata perbankan tidak konsisten dalam hal penggunaan kriteria persetujuan kredit. Ketidakkonsistenan tersebut dikarenakan adanya perbedaan keahlian dan pengetahuan dalam penilaian kredit dari para pegawai bank di negara tersebut. Terdapat preferensi dari pihak perbankan untuk lebih menyetujui pemberian kredit dengan jumlah kecil dan untuk perusahaan kecil yang tergolong lebih aman. Kondisi tersebut terjadi akibat perbankan tergolong risk averse yang disebabkan kurangnya informasi dalam proses penilaian kredit.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif terhadap proses pencatatan akuntansi yang berbasis Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik pada pelaku UMKM. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dan kuesioner terhadap pelaku usaha UMKM yang berada di PD Pasar Larangan - Sidoarjo. Dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dan kuesioner.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses pencatatan akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM. Dengan demikian penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- Mengidentifikasi pelaku UMKM yang akan menjadi objek penelitian melalui instansi terkait.
- Menyusun dan melakukan pengujian instrument penelitian.

- Mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden
- Verifikasi dan mengolah data penelitian
- Menganalisis data serta menyimpulkan sesuai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Obyek dalam penelitian ini adalah diambil dari Pasar Larangan –Sidoarjo, yang memenuhi kriteria sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)sesuai dengan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.Mayoritas pedagang yang ada di pasar larangan hamper 70% adalah perempuan yang sudah berumah tangga.Para perempuan pedagang di pasar larangan –Sidoarjo dipadati oleh orang –orang asal Madura yang pindah ke Sidoarjo untuk bekerja.Mereka kebanyakan kos /kontrak didekat pasar larangan bersama keluarganya ataupun dating ke Sidoarjo tanpa anaknya.Pedagang-pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya dari mulai tengah malam hingga siang hari, ada juga yang berangkat siang pulang hingga tengah malam dikala anak-anaknya sudah tidur.

Melihat luasnya pasar Larangan yang terbesar di Indonesia dibanding dengan pasar larangan dan mayoritas pedagangnya adalah perempuan yang sudah berumah tangga, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan obyek penelitian.

Hasil pengumpulan data diperoleh informasi terkait dengan deskripsi responden sebagai berikut : pedagang togu /ruko sebesar 20%, pedagang kios sebesar 20%, pedagang los sebesar 20%, pedagang pancaan sebesar 20%, pedagang kaki lima sebesar 20%.Umumnya pengelola UMKM berpendidikan formal minimal SD/MI dengan komposisi sebesar 45%,Lulusan SMP/MTs sebesar 40%, Lulusan SMA /MA sebesar 13%, dan yang lulusan S1 hanya 2%.

Untuk mengetahui gambaran apakah sektor UMKM di Pasar Larangan- Sidoarjo, sudah menerapkan pencatatan akuntansi atau tidak, maka diketahui mengenai pencatatan yang dilakukan oleh pengelola usaha.Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai pencatatan yang mereka lakukan,hasil yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

No	Transaksi yg dicatat	Responden				Jumlah Responden	
		Mencatat		Tidak Mencatat			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penjualan	32	64	18	36	50	100
2	Pembelian	34	68	16	32	50	100
3	Persediaan	28	56	22	54	50	100
4	Kas Masuk	45	90	5	10	50	100
5	Kas Keluar	45	90	5	10	50	100
6	Biaya	34	68	16	32	50	100
7	Gaji	25	50	25	50	50	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar pedagang hanya mencatat transaksi kas masuk (90%) dan kas keluar (90%). Sebagian besar yang hanya mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar aja hanyalah pedagang yang berpendidikan SD sampai dengan SMP/MI sebesar 85%. Menurut pendapat pengelola, mereka hanya mencatat kas masuk dan kas keluar saja sudah cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Apabila kas masuk lebih besar daripada kas keluar berarti laba.

Ada 32 responden (64%) melakukan pencatatan transaksi penjualan, 34 responden (68%) melakukan pencatatan pembelian, 28 responden (56%) melakukan persediaan dan 34 responden (68%) melakukan pencatatan biaya.. Pada pencatatan gaji, dari 50 responden terdapat 25 responden yang tidak memiliki karyawan (50%).

Seluruh responden belum pernah mendapatkan pelatihan pembukuan sederhana dan penyusunan laporan keuangan. Responden mengakui pentingnya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan usahanya, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui secara pasti keuntungan yang diperoleh setiap periode dari usaha yang dijalankannya sehingga perencanaan usaha secara pasti dapat dibuat.

Meskipun pengelola usaha menyadari arti pentingnya penyusunan laporan keuangan, tetapi secara umum di lapangan belum dijalankan secara konsisten dan teratur. Menurut penulis, hal ini menimbulkan persepsi mengenai urgensi keberadaan laporan keuangan bagi pengelola usaha UMKM antara lain :

a) Para pengusaha UMKM kurang menyadari betapa pentingnya laporan

keuangan bagi usaha yang dijalankan, sehingga pencatatan transaksi hanya sebatas pada transaksi kas keluar dan kas masuk seperti dalam tabel diatas. Dari pencatatan tersebut, menurut mereka dapat mengetahui keuntungan atau pendapatan atas pengelolaan usaha UMKM tersebut.

- b) Pengelola usaha UMKM di Pasar Larangan – Sidoarjo merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
- c) Kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Pengusaha UMKM tersebut merasa sulit dan repot menyelenggarakan catatan akuntansi dan menganggap bahwa yang terpenting adalah cara menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan tanpa dibebani dengan masalah akuntansi / pembukuan, hal ini sesuai dengan Idrus (2000) dan Pinasti (2001).

Dari penelitian tersebut terlihat adanya kendala dari sektor UMKM dalam penerapan akuntansi diantaranya adalah yang paling utama dikarenakan faktor latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola kurang memadai, sehingga kurangnya akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha. Hal itu ditunjukkan dari hasil kuesioner bahwa sebagian besar pengelola usaha (40,3%) pada tingkat sekolah menengah atas, dan pada sekolah menengah tingkat pertama (37,2%). Sebagian besar pengelola usaha (93,13%) belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi, dan yang hanya mengikuti sebesar (6,87%). Mereka menganggap bahwa pelatihan akuntansi hanya diperlukan pada usaha yang tidak dikelola sendiri. Menurut 32 responden

dari total 50 responden (64%) yang usahanya sudah berdiri selama 10 tahun menunjukkan bahwa usahanya dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak menerapkan akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan meliputi penjualan (64,3%), pembelian (68,2%), persediaan (56,3%), kas masuk (90,1%) dan kas keluar (90,1%), biaya (68,3%), dan gaji (50,4%).Pelaporan akuntansi hanya digunakan sebatas penggunaan dalam pengelolaan usaha tidak dijalankan sendiri. Kendala yang menghambat dalam penerapan akuntansi pada sektor UMKM diantaranya sebagai berikut :

- a) Para pengusaha UMKM kurang menyadari betapa pentingnya laporan keuangan bagi usaha yang dijalankan, sehingga pencatatan transaksi hanya sebatas pada transaksi kas keluar dan kas masuk.
- b) Pengelola usaha UMKM di Pasar Larangan – Sidoarjo merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
- c) Kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya.

Disamping kendala –kendala diatas yang paling utama dikarenakan faktor latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola kurang memadai, sehingga kurangnya akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha.

Saran

Dalam penelitian dimasa mendatang, sebaiknya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten khususnya dinas koperasi mengadakan kajian penelitian ini secara lebih mendalam terhadap UMKM. Sehingga dari informasi yang telah dikumpulkan dapat dibuat pelatihan akuntansi kepada sektor UMKM, sehingga dalam pengelolaan usahanya diharapkan akan dapat menguntungkan bersama-sama baik bagi pelaku UMKM maupun bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baas,T. dan M. Schrooten.2006, *Relationship Bankingand SMES : A Theoretical Analysis Small Business Economics*,27
- Cziraky,D.S.Tisma, and Pisarovic.2005. *Determinant of low approval rate in Croatia.Small Business Economic*,25, 347 – 371
- Departemen Koperasi.2016.*Berita*.diunduh tanggal 22 April 2016.www.depkop.go.id
- Ikatan Akuntan Indonesia 2014. *Standar Akuntansi Keuangan*,Jakarta,Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009,*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*,Per 1 Oktober, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kieso, Donald E,Jerry J. Weygandt.2008.*Akuntansi Intermediate*,Jakarta : Erlangga
- Murniati.2002..*Analisis Faktor –faktor yang mempengaruhi penyiapin dan penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah di Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Pinasthi.2001.*Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha para pedagang kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi,Bisnis dan Akuntansi,I
- Warren,Carls,James Reeve dan Philip E, Fees,2006.*Pengantar Akuntansi*,Edisi Dua Puluh Satu, Jakarta : Salemba Empat
- Warsono,S.dan E. Murti.2010.*Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan*.Yogyakarta : Asgard Chapter Winarno.

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR

Judul Penelitian: Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Studi Kasus pada PD. Pasar Larangan-Sidoarjo)
 Tanggal Wawancara : 7 – 8 Mei 2016

Tempat : PD.Pasar Larangan –
Sidoarjo

A. Identitas Informan

Nama Informan :
Jabatan Informan :
Jenis Kelamin :
Usia :

B. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa kerahasiaan informan terjamin.
3. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 25 menit sampai 30 menit.

C. Pertanyaan Wawancara

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

• Profil Usaha

1. Bagaimana awal berdirinya usaha?
2. Bagaimana perijinan usaha?
3. Dari mana sumber dana yang menjadi modal usaha?
4. Siapa saja yang terlibat dalam usaha?
5. Bagaimana struktur manajemen dalam usaha?
6. Adakah standar operasi tertulis yang diterapkan pada usaha?
7. Berapa omset yang didapat usaha dalam satu bulan?

• Pengakuan dan Pengukuran

1. Metode pengakuan yang digunakan cash atau accrual basic?
2. Apa menggunakan termin penjualan barang?
3. Bagaimana pencatatan untuk stock persediaan barang?
4. Metode apa yang digunakan dalam pencatatan persediaan barang tersebut?
5. Bagaimana pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan selama ini?
6. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki usaha?
7. Bagaimana sistem penggajian karyawan usaha?
8. Bagaimana sistem pembayaran persediaan barang yang dijual?
9. Bagaimana menghitung harga pokok penjualan barang?

10. Bagaimana pencatatan dan proses penjualan persediaan barang yang dijual cacat?

11. Bagaimana pencatatan dan proses pembelian persediaan barang yang dibeli cacat?

Penyajian

1. Penjualan disajikan dimana?
2. Laporan keuangan dibuat berapa bulan sekali?
3. Apa saja laporan keuangan yang dibuat?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara
2. Menyampaikan terima kasih
3. Mengakhiri wawancara